

KONTEKS PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR SEBAGAI ANALISIS PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DALAM PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME HISTORIS

Moch. Agung Lukmanul Hakim¹, Karim Suryadi², Cecep Darmawan³, Leni Anggraeni⁴
¹²³⁴FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
¹mochagung.lukmanulhakim@upi.edu, ²karimsuryadi@upi.edu, ³cecep darmawan@yahoo.com
⁴l_anggraeni@upi.edu

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :
Submit, 4 Nopember 2022
Revisi, 9 Nopember 2022
Diterima, 31 Desember 2022
Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Institusionalisme Historis
Kebijakan
Kebertahanan
Kepemudaan
Transformasi
Perubahan

ABSTRAK

Teori Turbulensi Intermiten dari Mandelbrot tentang harmoni dualitas realitas ketidaksinambungan dalam analisis kebijakan menjadi analogi yang mencerminkan *chaos* dan *order* sebagai kuantum transenden, dimana potensi dan probabilitas yang berkaitan dengan perubahan ataupun keberlanjutan kebijakan sangat dimungkinkan melalui *critical juncture* dalam perlintasan waktu tertentu. Proses penelitian dengan pendekatan institusionalisme historis ini, mempunyai tujuan krusial menjalankan penyelidikan signifikansi dan implikasi dari trajektori perubahan dan keberlanjutan kebijakan kepemudaan pada lintasan waktu tertentu sebagai analisis perkembangan kelembagaan dalam menunjang transformasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur yang lebih kontekstual. Adapun hasil dari penelitian ini merepresentasikan bahwa: (1) Bahwa setiap implementor dari kebijakan kepemudaan baik Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten maupun Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur tidak secara ketat mencerminkan resistensi terhadap perubahan, yang biasa ditemukan sebagai konsekuensi rasional dari jalur kelaziman. (2) Sekalipun kondisi akumulasi bukti ilmiah, kebuntuan kebijakan kepemudaan dan guncangan bersifat eksternal telah memenuhi kualifikasi sebagai mekanisme dari perubahan kebijakan, namun tidak terdapat *conjunctures* yang menjadi hubungan interaksi antara seluruh implementor menimbang terdapat arah perubahan lingkungan strategis. (3) Melalui proyeksi perlintasan waktu empat tahun terakhir, tidak dapat diidentifikasi transaksi aktual persebaran ide perubahan kebijakan kepemudaan baik secara koersif maupun kooptatif dalam analisis jaringan sebagai pemerintahan. (4) Implementasi kebijakan sebagai kebijakan distingtif dari setiap implementor dengan trajektori repetitif pada perlintasan waktu tersebut, secara holistik menjadi variabel pengukuran dari inisiasi dan reproduksi kebijakan yang menunjukkan seluruh implementor tidak mengalami *self-reinforcing* dan *positive feedback* dari berbagai dinamika kelembagaan. Bahwa implikasi dari penelitian ini, telah menghadirkan pemetaan terkait konstruksi utama transformasi kebijakan kepemudaan berbasis analisis perkembangan kelembagaan

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Moch. Agung Lukmanul Hakim
Universitas Pendidikan Indonesia
Email: mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Secara normatif bahwa pelayanan kepemudaan dalam UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permensos No. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna dan UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2017 terkait Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang termasuk berbagai peraturan lain sebagai tindak lanjut dari kerangka kebijakan utama tersebut, secara konkrit mempertegas disposisi Flanagan dan Christens (2011) terkait posisi sentral pemuda dalam pembangunan masyarakat dengan bertumpu pada tindakan kolektif, kesadaran rasional, tanggung jawab dan rasa keadilan. Sampai dewasa ini, berbagai tujuan dari kerangka kebijakan kepemudaan demikian di Kabupaten Cianjur masih representasi etika kebijakan fiktif, karena pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Cianjur pada skala penilaian Provinsi Jawa Barat masih termasuk kualifikasi terendah baik dalam bidang partisipasi dan kepemimpinan, pendidikan, kesehatan dan taraf kesejahteraan maupun bidang gender dan diskriminasi (Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia, 2019). Oleh karena itu, sebagai faktualitas tidak terbantahkan bahwa terminologi dari pembangunan pemuda masih memperlihatkan masalah ketidaksetaraan yang melibatkan kalangan pemuda secara langsung dalam gravitasi ketidakadilan struktur sosial (Hakim, Darmawan dan Anggraeni, 2022).

Ketika infiltrasi agenda politik-agama, perebutan pengaruh tentang organisasi internasional, persaingan taraf pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, kekuasaan dan persinggungan *fault line* merupakan cerminan benturan peradaban (Huntington, 2012), maka pemuda sendiri akan semakin riskan terhadap berbagai jaring jebakan stereotif dan prasangka implisit yang memperburuk situasi kelemahan pemuda yang telah ada. Kondisi pemuda yang berjuang sendiri ditengah gejolak masyarakat informasi, secara natural akan memasuki dimensi dari Gambetta dan Sugden (1995) di mana terdapat pengalaman destruktif untuk tidak mempercayai pihak manapun. Ketika paradigma tentang peran pemuda sebagai pusat gravitasi perubahan semakin berkembang pesat, justru terdapat realitas paradoks bahwa secara koheren kalangan pemuda sendiri masih bersinggungan (Woodman, Shildrick dan MacDonald, 2020) dengan masalah perubahan sosial, demokratisasi (Cuervo dan Miranda, 2019) dan mengakibatkan perubahan dalam ruang pandangan pemuda tentang ketidaksetaraan (Jeffrey dan MacDowell, 2004) yang memang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan ruang pikiran dan realitas sebelumnya. Padahal, secara alamiah keberadaan pemuda tidak lain entitas brilian yang sempurna bahkan simpati pemuda tidak akan berbeda

dengan atmosfer bumi yang dapat melindungi kebhinekaan (Hakim, 2022). Keberadaan pemuda bagaimanapun juga, akan selalu berkorelasi dengan konstruksi manusia mandiri yang bergantung pada jaringan signifikansi yang dihasilkan secara mandiri dalam proses aktualisasi diri melalui peran krusial dalam masyarakat.

Menimbang semakin meningkatnya kesadaran tentang peran krusial pemuda tersebut, maka penelitian ilmiah berkenaan pembangunan pemuda yang konstruktif menjadi salah satu diskursus pada abad ini (Threadgold, 2019). Bahwa keberadaan pemuda secara alamiah dijadikan aset pembangunan (Devadoss dan Anand, 2013) serta akselerator pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab moralitas, yang bertumpu pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Youniss dan Yates, 1999). Secara normatif memang terdapat trajektori korelatif antara preferensi pertumbuhan ekonomi serta jumlah pengangguran kalangan pemuda (Onwuka dan Chukwuma, 2020; Göçer dan Erdal, 2015; Çondur dan Şimşir, 2017), namun bonus demografi dengan preferensi pemuda untuk menjamin akselerasi taraf pertumbuhan ekonomi justru menempatkan pemuda dalam situasi riskan dengan kekerasan politis (Urdal, 2006). Terlebih lagi, dalam skala global terdapat sekitar 1,3 Milyar pemuda usia antara 12 – 24 tahun dengan proporsi 130 juta diantaranya bahkan sama sekali menguasai kompetensi mendasar seperti menulis dan membaca (Arnot dan Swartz, 2012). Proporsi pemuda dalam skala global demikian mencapai kisaran 40% - 60% dari keseluruhan populasi Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara dengan perhatian khusus terkait dividen demografis (Bloom, Canning dan Sevilla, 2003).

Lebih dari lima dekade terakhir, sejumlah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai telah berhadapan dengan kontinuitas transformasi menuju postindustrial (Bell, 1973). Proses sebagai representasi utuh dari gelombang ketiga tersebut memang diproyeksikan akan memiliki arah trajektori yang relevan dengan dua gelombang terdahulu (Toffler, 1980). Bahwa proses deindustrialisasi Rush Belt yang terjadi di Amerika dan manufaktur di negara lain merupakan titik permulaan kelahiran implikasi destruktif dari era industrialisasi dengan degradasi sistem sosial yang direpresentasikan melalui indikator penurunan kualitas kepercayaan, masalah dalam keluarga termasuk peningkatan jumlah kejahatan (Fukuyama, 2016). Bahwa implikasi era disrupsi sendiri sebagai realitas yang bahkan tidak dapat dihindari dari industrialisasi tidak menutup kemungkinan menjadi karakteristik yang artifisial dan tidak realistik dalam mengartikulasikan pengalaman pemuda berkenaan kehidupan. Pemuda berada pada kondisi ruang dunia yang sulit untuk dikalkulasikan, sehingga mengalami keterlambatan melaksanakan adaptasi terhadap tujuan berbasis kolektif, menimbang terdapat distorsi dalam

penyelenggaraan nilai sosial dengan menempati kedudukan antededen rasional di masa depan dari probabilitas masalah kepemudaan yang semakin berkembang secara berkelanjutan.

Kesenjangan terbuka antara arah tujuan dari kerangka kebijakan kepemudaan serta pencapaian IPP Cianjur dengan kualifikasi terendah sebagai representasi hasil kebijakan, secara hipotetik di masa mendatang dapat menghadirkan masalah krusial dan kompleks. Bahwa pemetaan masalah kepemudaan tersebut, dapat dilaksanakan melalui mempertimbangkan trajektori perubahan IPPI selama tujuh tahun terakhir dengan masing-masing mencapai nilai 48.67, 50,83, 49.33, 51.50, 52.67, 51.00 dan 51.00. Berdasarkan regularitas dari perubahan trajektori IPPI antara rentang tahun 2015 -2021 yang diproyeksikan melalui persamaan linieritas perbandingan, maka pencapaian nilai 57,67 sebagai target IPPI Tahun 2021 masih belum tercapai bahkan pencapaian IPPI antara rentang tahun 2030 - 2040 tidak berubah signifikan. Dengan asumsi trajektori perubahan IPPI mempunyai linieritas dengan pencapaian IPP Kabupaten Cianjur, secara normatif akan menjadi masalah Pemerintah Cianjur yang sulit dikonstruksikan pemecahan masalah ketika bertepatan dengan kulminasi bonus demografis, karena dapat berdampak secara langsung terhadap peningkatan beban ketergantungan (Muhaemin, 2021), yang justru menjadi reaktor utuh masalah pada era disrupsi seperti hubungan dalam keluarga, masalah kepercayaan termasuk kriminalitas (Fukuyama, 2004; 2010; 2016).

Permasalahan terbesarnya adalah mengapa pelayanan kepemudaan yang telah ditetapkan sebagai arah Kebijakan Nasional melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, ketika direalisasikan langsung Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai trajektori keberhasilan yang berbeda?. Dalam laporan IPPI tahun 2019 misalnya, IPP Provinsi Jawa Barat berada pada posisi juru kunci dengan capaian 46.17 yang tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun 2015 yang berkisar 45.83. Sementara Provinsi D. I. Yogyakarta menempati posisi teratas dengan capaian 70.33 bahkan mengalami perubahan menjanjikan sedari tahun 2015 yang hanya berkisar 65.50. Secara teoritis, bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh konstruksi variabel distingtif yang dimiliki setiap daerah (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015) yang bekerja dalam tahap implementasi. IPP Kabupaten Cianjur dengan linieritas terhadap perubahan trajektori IPPI bahkan termasuk dalam kualifikasi terendah, berbeda dengan Kota Depok yang menempati posisi teratas dalam skala Provinsi Jawa Barat. Sebagai kebaruan dari penelitian, harus dilaksanakan penyelidikan sebagai pengujian hipotesis bahwa permasalahan demikian dapat terjadi karena terkait jalur kelaziman, *conjunctures*, persebaran ide bahkan inisiasi dan reproduksi kebijakan dalam perlintasan waktu

tertentu sebagai dasar *critical juncture* dari perubahan atau keberlanjutan kebijakan kepemudaan.

Di Colorado, pada tahun 1989 dilaksanakan sebuah lokakarya mengenai ilmu politik dan kebijakan publik dengan terminologi institusionalisme historis cukup menarik perhatian sebagai pendekatan terbaru dalam analisis kebijakan publik yang cukup berbeda dari pendekatan institusionalisme pilihan rasional. Ketika kerangka pendekatan institusionalisme pilihan rasional memandang preferensi aktor dalam kebijakan memiliki karakteristik tetap dan bergantung secara penuh pada kekuatan institusi, maka institusionalisme historis bahkan menilai bahwa institusi demikian tidak sepenuhnya kalkulatif. Karena bagaimanapun akumulasi sejarah berpengaruh terhadap preferensi aktor, sistem nilai bahkan inti keyakinan (Steinmo, 2016), tidak hanya berkenaan konsensus dalam arena tindakan. Pada tahun 1994, studi mengenai institusionalisme historis diperkuat oleh tulisan Kathelen Thelen, sehingga sedari hal tersebut perkembangan institusionalisme historis semakin pesat dalam perihal studi ilmu politik dan kebijakan publik sampai dewasa ini (Bleich, 2017; Mahoney, 2017). Pada masa awal perkembangan institusionalisme historis, kajian dilakukan dengan memberikan konsentrasi terhadap bagaimana sebuah ide dapat berdampak pada pengambilan keputusan sebagai kebijakan dalam konteks waktu tertentu.

Tidak jauh berbeda dengan pendekatan institusionalisme pilihan rasional dan institusionalisme sosiologis, bahwa institusionalisme historis juga mencerminkan pemaknaan institusi dalam kerangka konseptual formal dan informal. Representasi holistik dari institusi dalam perspektif institusionalisme historis tidak hanya akan terkonsentrasi pada regulasi, melainkan juga ide, norma, standar moralitas, dimensi kognitif dan kebiasaan (Sorensen, 2014; Skocpol dan Pierson, 2002). Hal demikian tidak bermakna bahwa institusionalisme historis memiliki persamaan karakteristik secara penuh dengan formasi sebelumnya. Diferensiasi institusionalisme historis terdapat dalam prosedur dalam menentukan institusi yang diselidiki. Karena lokasi konsentrasi institusionalisme historis terdapat dalam konteks kurun waktu, maka implikasi rasionalnya seluruh bentuk institusi yang terlibat dalam trajektori rentang waktu demikian menjadi keharusan untuk diselidiki (Putra dan Sanusi, 2019). Studi keberadaan berbagai institusi dan organisasi yang terjalin dalam samaran kontinum inheren dan membentuk momentum yang berimplikasi terhadap formula kebijakan merupakan ilustrasi utama dalam kajian institusionalisme historis. Karena dalam pada perlintasan waktu tertentu, cukup irasional ketika tidak terdapat jalinan antara institusi dalam memperjuangkan pencapaian berbagai kepentingan.

Ketika institusionalisme sosiologis menempatkan terminologi institusi dalam konteks

interpretasi aktor dalam kebijakan terhadap keberadaan serta pelembagaan institusi yang melahirkan identitas dan nilai, maka implikasi dari institusi berbasis pendekatan institusionalisme historis akan terikat oleh besaran tekanan ruang dan waktu. Bahwa institusi dan aktor akan terus mengalami perkembangan yang terkait dengan konfigurasi interaksi dalam perlintasan waktu sebelumnya, sehingga dapat memberikan ilustrasi konkret terkait capaian dalam periode berikutnya (Hall, 2016) sebagai pemetaan probabilitas perkembangan kelembagaan. Sekalipun demikian, trajektori waktu pada pendekatan institusionalisme historis secara normatif tidak hanya terkait dengan kronologi kejadian yang melibatkan institusi dan perilaku dari aktor dalam jaringan kebijakan, melainkan juga merupakan proses sangat kompleks (Skocpol dan Pierson, 2002) dengan melahirkan perdebatan tajam konsep temporal seperti titik kritis, peristiwa sela, jalur kelaziman serta perubahan bertahap (Fioretos dkk., 2016). Kronologi suatu peristiwa tidak mungkin juga diabaikan, karena dalam kerangka institusionalisme historis dapat dipergunakan dalam memuat regularitas hubungan relasional antara keberadaan kekuatan institusi dengan setiap aktor yang terlibat langsung dalam perjuangan pencapaian preferensi.

Dalam perspektif institusionalisme historis, keberadaan dan perubahan dari institusi menjadi perhatian spesifik, yang dapat berlangsung baik secara fundamen maupun kontinuitas (Putra dan Sanusi, 2019). Institusi dapat mengalami perubahan skala besar ketika terdapat desakan yang kuat dari akumulasi kekuatan oposisi dan desakan publik yang menuntut terdapat perubahan secara lebih substantif. Terlebih lagi ketika suatu institusi yang ada dinilai tidak lagi relevan dalam mengakomodasi kebutuhan, tuntutan serta harapan sebagian besar aktor kebijakan terutama anggota masyarakat sendiri. Berbeda dengan perubahan fundamental karena adanya entitas kekuatan oposisi, perubahan secara gradual terjadi ketika memang terdapat tuntutan krusial terhadap lingkungan baik secara internal maupun eksternal yang juga dapat terjadi secara gradual sesuai dengan dinamika yang ada. Bahwa perubahan institusi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, terlebih konsentrasi besar kalangan profesional terhadap dinamika perubahan dalam institusi melalui kontestasi politik dan perubahan sendiri secara kontekstual (Thelen dan Conran, 2016). Oleh karena itu, institusionalisme historis mempunyai konsentrasi menjalankan penyelidikan mendalam seluruh rimba raya informasi yang terkait secara langsung dengan proses perubahan dan keberlanjutan institusi (Sorenson, 2015), karena dalam kedua perihal tersebut akan terlihat pengaruh kekuatan institusi terhadap pemilihan tindakan dari berbagai implementor terkait.

Pendekatan institusionalisme historis menuntut terdapat penyelidikan lebih dalam terhadap berbagai

kepentingan dan bagaimana sebuah peristiwa tertentu akan memberikan implikasi krusial terkait perubahan kelembagaan. Untuk mendapatkan pemahaman historis demikian, tentu analisis kebijakan harus menghadirkan proses eksplorasi *timing*, *ordering* dan *linking* (Boychuk, 2017). Dengan arah pendalaman terhadap ketiga dimensi tersebut, maka dapat dipahami bagaimana sebuah kejadian tertentu dapat memberikan perubahan signifikan terhadap kebijakan publik. Bahwa institusionalisme historis secara normatif merupakan kajian dengan menekankan kajian tentang proses pembentukan, kontinuitas dan perubahan institusi dari waktu ke waktu (Sorensen, 2014) sebagai bagian dari perjalanan sejarah keberadaan suatu institusi. Ketiga proses tersebut terjadi dalam kurun waktu berbeda, sekalipun tidak jarang berjalan bersamaan serta bertahap. Menimbang kondisi demikian, institusionalisme historis dinilai cukup prima dalam memberikan penjelasan terukur terkait kontinuitas dan perubahan kebijakan. Tanpa informasi terukur tentang kontinuitas dan perubahan kebijakan, berbagai implementor akan berhadapan dengan kesulitan dalam memberikan arahan terhadap implementasi kebijakan dalam sesi selanjutnya. Karena samaran kontinum dari kausalitas dan temporalitas berjalan secara koheren dalam berbagai manifestasi terukur dengan bergantung pada konfigurasi perubahan (Mahoney, Mohamedali dan Nguyen, 2016).

Bahwa proses penyelidikan signifikansi dan implikasi dari beberapa konsepsi krusial pada pendekatan institusionalisme historis pada penelitian ini, hanya akan berorientasi terhadap variabel jalur kelaziman, tingkat *conjunctures*, lintasan waktu, persebaran ide bahkan inisiasi dan reproduksi (Putra dan Sanusi, 2019). Keberadaan institusi yang telah melembaga sedari lama dan mengakar, akan mempunyai bentuk kecenderungan signifikan untuk semakin melembaga sesuai dengan arah dinamika perkembangan zaman, karena terus terinternalisasi dalam suatu masyarakat dengan konstituen tertentu (Putra dan Sanusi, 2019). Implikasi rasional dari jalur kelaziman yang tidak mungkin dihindari adalah terbentuknya daya resistensi institusi terhadap berbagai perubahan terutama secara fundamental. Koalisi advokasi yang terbentuk pada subsistem kebijakan yang menuntut rekonstruksi pelayanan kepemudaan yang lebih relevan dengan kebutuhan pemuda, akan berhadapan dengan aktor lain dalam subsistem kebijakan yang menunjukkan penolakan secara terbuka terhadap berbagai perubahan dalam kebijakan kepemudaan. Merupakan masalah besar ketika institusi pemerintah yang seharusnya mengakomodasi setiap kepentingan, ternyata menjadi representasi dari resistensi terhadap perubahan itu sendiri. Terlebih lagi, eksistensi sebuah institusi mempunyai tendensi signifikan untuk mempertahankan konstruksi kebijakan yang melembaga sedari lama (Sorensen, 2014).

Variabel cukup krusial kedua dalam pendekatan tersebut adalah *conjunctions*. Bahwa *conjunctions* merupakan terminologi yang merepresentasikan keseluruhan interaksi dan implikasi rasional dari hubungan kausalitas berbagai kejadian selama rentang waktu tertentu (Putra dan Sanusi, 2019). Dalam kerangka koalisi advokasi sebagai basis penyelidikan pendekatan behaviorisme bahwa *conjunctions* bahkan berkenaan dengan peristiwa eksternal. Berbagai aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan akan memberikan perhatian terhadap berbagai kejadian yang akan secara langsung mempengaruhi konfigurasi kerangka dari koalisi advokasi pada subsistem kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1999), seperti penilaian masyarakat, proses pengambilan keputusan terdahulu, perubahan aspek sosial-ekonomi (Eisner, 1993), mekanisme perubahan termasuk perubahan konstruksi dalam koalisi pemerintahan (Brady, 1988). Terlebih lagi, analisis berkaitan hubungan politis dalam masyarakat harus memperlihatkan proses berkelanjutan dalam trajektori waktu yang tervalidasi dengan terkonsentrasi pada pengaturan kelembagaan dan preferensi dari kelompok koalisi advokasi (Pierson, 2016). Dalam konteks penelitian pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur, *conjunction* akan ditunjukkan dengan interaksi para aktor dan implikasi yang hadir ketika dihadapkan dengan ketidaksetaraan dari pembangunan struktur sosial kalangan pemuda.

Dengan demikian, bahwa *conjunctions* dalam penelitian ini akan menunjukkan bagaimana interaksi antara kelompok koalisi advokasi dengan masyarakat bahkan kalangan pemuda sebagai sasaran dari kebijakan, tidak terkecuali dengan kelompok koalisi advokasi lain dengan keyakinan untuk mempertahankan program pelayanan kepemudaan yang ada. Selain itu, *conjunctions* akan terdeteksi sampai sejauh mana implikasi berbagai peristiwa eksternal terkait dapat mempengaruhi secara langsung pilihan rasional implementor kebijakan berkaitan program pelayanan kepemudaan yang lebih relevan dengan kebutuhan keterampilan kalangan pemuda dalam kurun masa tertentu. Bahwa *conjunctions* sendiri tidak akan terlihat dan tidak memberikan signifikansi apapun ketika institusi terkait telah mempunyai resistensi sangat prima terhadap berbagai perubahan dan kejadian eksternal dalam praktik global sekalipun. Karena bagaimanapun juga, alternatif dari kebijakan yang berbeda secara distingtif dengan kebijakan terdahulu akan cenderung tidak seksama diperhatikan pemerintah sendiri, sehingga implementasi kebijakan merupakan upaya sistematis untuk secara berkelanjutan mempertahankan status kelembagaan yang ada.

Secara aktual bagaimanapun juga *conjunctions* akan menunjukkan kualitas dari kedalaman penyelidikan terhadap tahapan antara suatu peristiwa dengan pemilihan tindakan yang memungkinkan

untuk memahami relasi kausalitas. Pendekatan yang dinilai paling relevan dalam merepresentasikan relasi tersebut, tidak lain kombinasi analisis varian dengan regresi (Putra dan Sanusi, 2019). Kehadiran *process-tracing* berbasis rasionalitas inferensi Bayesian (Bennet, 2009) dewasa ini telah berhasil disintesis dalam pendekatan kuantitatif, sekalipun probabilitas penerapan dalam pendekatan kualitatif memang menghadirkan keterbatasan (Fairfield dan Charman, 2017). *Process-tracing* sebagai metode dari institusionalisme historis merupakan perspektif kualitatif untuk detail menampilkan hubungan kausalitas melalui konteks *temporal scope*. Dalam perspektif tersebut, tingkat hubungan kausalitas tidak hanya direpresentasikan melalui pembuktian korelasi antara dua variabel berbeda (Beach, 2016), melainkan memberikan penjelasan secara substantif berkaitan latar belakang sebuah peristiwa sebagai faktualitas yang menjadi anteseden dari hubungan antara aktor yang terlibat (Putra dan Sanusi, 2019). Bahwa *conjunctions* sebagai interaksi antara implementor kebijakan, dapat diproyeksikan melalui perubahan yang terkait lingkungan strategis seperti kondisi sosial-ekonomi, lingkungan biofisikal termasuk pengaturan kelembagaan dalam mencapai preferensi implementor.

Variabel krusial kali ketiga dari pendekatan institusionalisme historis, yang menjadi titik tumpu dalam proses penelitian ini tidak lain lintasan waktu yang akan dipergunakan untuk memberikan validitas terkait kurun waktu yang akan dialami sebagai kunci utama kredibilitas penelitian, karena dalam lintasan waktu demikian terdapat aktor yang menuntut perubahan (Putra dan Sanusi, 2019). Kebijakan yang pada dasarnya ditandai dengan eskalasi resistensi terhadap struktur perubahan, akan dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Sebagai respons terkait peristiwa tersebut, pemangku kepentingan dihadapkan dengan pilihan untuk melakukan perubahan kebijakan holistik, sehingga persimpangan krisis akan terjadi ketika terdapat poin pertemuan titik bifurkasi antara peristiwa krisis yang menuntut perubahan dan reformulasi kebijakan. Konsep titik kritis tersebut, secara substantif berkorelasi dengan situasi yang tidak dapat diproyeksikan dengan implementor dari kebijakan secara kausal menentukan pemilihan tindakan tertentu (Capaccia, 2016). Dalam kondisi tersebut, terdapat kecenderungan signifikan dari berbagai pemangku kepentingan terutama pemerintah, ketika berhadapan langsung dengan tuntutan dari publik untuk melaksanakan perubahan kebijakan adalah mengambil kebijakan yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan konstruksi kebijakan sebelumnya. Hal demikian dipandang sebagai pilihan paling rasional, karena mengadakan perubahan secara fundamental akan membutuhkan mobilisasi sumber daya yang besar.

Bahwa tingkat persebaran ide menjadi variabel kali keempat dalam institusionalisme historis, karena

secara natural keberadaan ide sebagai representasi prima sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat merupakan bagian paling koheren dari institusi informal (Putra dan Sanusi, 2019). Pada konteks analisis kebijakan publik, tingkat persebaran ide akan memberikan tumpuan dasar penyelidikan terhadap arah transaksi ide kebijakan sebagai preferensi dari aktor yang terlibat dengan berbagai komponen masyarakat terutama kelompok sasaran kebijakan pemerintah. Variabel tersebut juga memberikan probabilitas terbuka untuk melakukan identifikasi secara utuh terkait kemunculan ide perubahan yang secara normatif membangun diametral tajam dengan ide konvensional yang telah melembaga sedari lama secara dominan (Bleich, 2017). Terlebih lagi, ruang kombinasi intensional antara agenda ideasional dan institusional memberikan jaminan menjanjikan untuk pengembangan berbagai penelitian institusionalisme historis di masa depan (Blyth, Helgadottir dan Kring, 2016). Dengan demikian, tingkat persebaran ide merupakan peristiwa koheren yang memungkinkan keberlangsungan atau perubahan kebijakan dalam konteks lintasan waktu tertentu. Karena bagaimanapun juga, institusionalisme historis tidak dapat mungkin terfragmentasi dengan keberadaan trajektori waktu, yang dalam kalangan peneliti institusionalisme historis cukup populer juga dikenal dengan “*Take Time Seriously*” (Boychuk, 2017).

Bahwa variabel terakhir dalam pendekatan tersebut adalah tingkat inisiasi dan reproduksi. Dalam pendekatan institusionalisme historis, variabel paling terakhir tersebut dapat mencerminkan perkembangan kelembagaan melalui hasil kebijakan dalam perlintasan waktu tertentu. Streeck dan Thelen (2005) memberikan deskripsi terkait dinamika perubahan kebijakan meliputi *displacement*, *layering*, *drift* bahkan *conversion*. Bahwa *displacement* menunjukkan situasi bahwa aturan yang ada sedari lama telah diganti dengan seperangkat aturan baru secara mendasar (Mahoney dan Thelen, 2012). Bahwa perubahan aturan demikian dapat terjadi secara cepat dengan pergerakan radikal, namun dapat juga terjadi melalui proses yang cukup lambat dan bertahan secara berkelanjutan. Ketika institusi lama sulit melaksanakan perubahan secara fundamental dan pada saat bersamaan tidak dapat memberikan restriksi kuat terhadap perubahan, maka perubahan kelembagaan secara bertahap tidak akan lagi terbendung. Pada perspektif analisis kebijakan publik, perubahan kebijakan secara mendasar merupakan model formal (Putra dan Sanusi, 2019), yang hanya dilakukan melalui prosedur legal sebagai pilihan yang tersedia dalam arena tindakan berbasis kolektivitas.

Layering terjadi ketika aturan baru dilampirkan sedemikian rupa dalam aturan lama, sehingga memberikan probabilitas terbuka untuk aturan baru mempengaruhi perilaku (Schickler, 2001; Thelen, 2003). *Layering* tidak menghadirkan aturan yang baru secara penuh, melainkan dapat berbentuk

amandemen, revisi bahkan berbagai penambahan tentang poin tertentu (Mahoney dan Thelen, 2012). Sekalipun formasi *layering* tidak membawa perubahan aturan secara holistik, namun tetap mempunyai potensi untuk membawa perubahan substansial ketika perubahan yang memberikan perubahan paradigma dari aturan sebelumnya. *Drift* berlangsung ketika aturan terus mengalami perubahan fundamen, sehingga terdapat perubahan sebagai representasi dari perubahan kondisi eksternal (Hacker, 2005). Ketika aktor memilih tidak secara seksama menanggapi perubahan lingkungan, maka kelambatan tersebut tidak dapat berakibat perubahan dalam institusi sendiri. *Drift* menunjukkan perubahan berbagai kebijakan yang mungkin dapat terjadi karena tekanan kelompok *status quo* lumayan kuat, namun pada saat bersamaan ruang diskresi dan perubahan terbuka secara lebih konkrit. Sementara *Conversion* sendiri akan terjadi ketika aturan formal tetap sama, namun akan diinterpretasikan dengan lebih moderat (Thelen, 2003), sehingga akan menghasilkan perubahan yang lebih realistis dalam masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Bahwa metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah *process-tracing* sebagai bentuk pendekatan kualitatif yang memberikan probabilitas terbuka dalam melakukan penyelidikan terhadap mekanisme dari kausalitas (Crasnow, 2017; Hay, 2016; Kittel dan Kuehn, 2013; Mahoney, 2010; 2015) pada lintasan waktu tertentu. Metode tersebut merupakan instrumen penelitian yang relevan dalam menjalankan identifikasi keberadaan interaksi antara implementor kebijakan, pengaturan secara kelembagaan termasuk ide baik terkait perubahan maupun keberlanjutan kebijakan kepemudaan pada arena tindakan berbasis kolektivitas. Pemilihan metode demikian bukan hanya karena *process-tracing* memungkinkan melakukan penyelidikan utuh terhadap kausalitas serta perubahan kebijakan, melainkan juga mempertimbangkan probabilitas penekanan kausalitas dengan bertumpu pada perubahan secara gradual yang memberikan informasi jalur kelaziman (Pierson, 2000) dan konsekuensi logis dari pemilihan tindakan setiap implementor kebijakan pada arena tindakan (Wong, 2013). Oleh karena itu, metode institusionalisme historis tersebut secara normatif akan terkonsentrasi terhadap pengujian hipotesis, pengembangan bahkan falsifikasi teori (Crasnow, 2017; Collier, 2011; Beach dan Pederson, 2013; Falletti, 2016) yang direalisasikan melalui pemetaan hubungan kausalitas antara peristiwa strategis dan perubahan yang dihasilkan. Kegagalan dalam melaksanakan penyelidikan terhadap proses, dapat berdampak langsung pada inferensi kausalitas yang tidak mempunyai daya kredibilitas (Rohlfing, 2013).

Sekalipun *process-tracing* memiliki kecenderungan terus dipergunakan pada penelitian

kualitatif, namun secara praktik memang tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan penggunaan misalnya dalam studi politik lingkungan, politik komparatif dan hubungan internasional (Vanhalta, 2017), karena tidak terdapat kerangka acuan baku terutama dalam skema pengajaran penggunaan (Ricks dan Liu, 2018). Dengan seksama bertumpu pada kerangka *process-tracing* dari kalangan profesional seperti Andersen, Redlawsk dan Lau (2019), Beach dan Pederson (2013), Kay dan Baker (2015), Lorentzen, Fravel dan Paine (2017), Mahoney (2012a, 2012b), Payne dan Payne (2004), Ricks dan Liu (2018) bahkan Saldana (2009), maka metode *process-tracing* yang dalam penelitian ini terkonsentrasi pada tahap pengujian hipotesis dari mekanisme kausalitas (Beach and Pedersen, 2011) dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, membangun konstruksi dasar dari hubungan kausalitas antara perubahan lingkungan strategis, pemilihan tindakan implementor dan implikasi sistemik yang tidak terlepas dari perkembangan kelembagaan pada rentang waktu tertentu sebagai hipotesis penelitian. *Kedua*, mengidentifikasi keberadaan dasar *critical juncture* seperti akumulasi bukti empirik, kebuntuan kebijakan kepemudaan dan guncangan eksternal sebagai mekanisme perubahan kebijakan dengan jaminan atas kredibilitas data. *Ketiga*, menjalankan pengujian hipotesis melalui analisis hubungan kausalitas dengan pemetaan jalur kelaziman, *conjunctures*, proses persebaran gagasan bahkan inisiasi dan reproduksi kebijakan dalam trajektori waktu tertentu.

3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan dari Disparpora Kabupaten Cianjur melalui Sub Koordinator Kepemudaan direpresentasikan secara utuh dalam Program Peningkatan Peranan Serta Organisasi Kepemudaan dan Olahraga sebagai Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yang diselenggarakan melalui Pemberdayaan serta Pengembangan Organisasi Kepemudaan seperti pengiriman 16 anggota Paskibra ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Kepemimpinan termasuk Jambore Pemuda. Pada tahun 2018 lalu bahwa pelayanan kepemudaan hanya terbatas Jambore Pemuda dengan 250 partisipan dan Pelatihan Paskibra dengan 35 orang personil, yang telah mempergunakan anggaran mencapai Rp. 654.551.975, sekitar 98,48% dari rencana kinerja (LKIP Disparpora, 2018). Pada tahun 2019 hanya terbatas pada Pelatihan Paskibra 35 orang, Pelatihan Kewirausahaan dengan 100 orang partisipan serta lomba PBBAB dengan total nilai anggaran Rp. 536.562.300 (LKIP Disparpora, 2019), yang pada tahun 2020 terbatas pada Pelatihan Paskibra menjadi enam peserta dan Pelatihan Kepemimpinan hanya melibatkan 100 orang partisipan dengan anggaran sebesar Rp. 364.400.000 (LKIP Disparpora, 2020). Sementara tahun 2021,

terbatas pengiriman 16 personil Paskibra dan Pelatihan Kepemimpinan dengan melibatkan tidak lebih dari 50 orang peserta (LKIP Disparpora, 2021).

Pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan DPD KNPI Kabupaten sedari lama merupakan program kemitraan dan partisipasi yang belum otonom seperti seminar, Sarjana Setiap Desa, Ketahanan Pangan, Pembinaan Kewirausahaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan, Koordinasi dengan Komandan Kodim, Kepolisian Resort dan BBN Cianjur terkait kenakalan remaja dan kegiatan sosial lain. Bahwa berbagai pelayanan kepemudaan yang dapat diidentifikasi dalam kurun waktu empat tahun terakhir tersebut memang tidak dapat diverifikasi keberhasilan penyelenggaraannya, karena program Sarjana untuk Setiap Desa, Ketahanan Pangan Masyarakat bahkan mekanisme penanganan permasalahan pemuda masih terbatas prakonsept dengan signifikansi embrionik dan bukan merupakan ide gagasan yang telah dioperasionalkan sebagai pemecahan masalah secara kontekstual. Sementara pelayanan kepemudaan dari Karang Taruna Kabupaten Cianjur secara normatif menjadi program persuasif terkait pelembagaan Karang Taruna Desa melalui skema percontohan serta keterlibatan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan bersama Bappeda Cianjur. Pelayanan kepemudaan baik dari DPD KNPI maupun Karang Taruna Kabupaten Cianjur telah menunjukkan kecenderungan signifikan dalam empat tahun terakhir diselenggarakan secara parsial melalui program otonom berbasis penyadaran misalnya seminar atau temu bicara sebagai pelayanan konvensional dengan ruang pemetaan cakupan serta implikasi yang relatif tidak dapat diidentifikasi.

Dibandingkan dengan implementor kebijakan lain, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur memiliki program pelayanan kepemudaan yang jauh lebih variatif, prima dan mapan secara institusional seperti Program Pembinaan Anggota Dewasa (Binawasa) dan Program Pembinaan Anggota Muda (Binamuda), Program tentang Perencanaan, Organisasi dan Hukum (Renorgakum), Program terkait Satuan Karya, Satuan Komunitas dan Gugus Darma (Saka Sako Gudar), Program terkait Prioritas Pengelolaan Keuangan, Aset serta Usaha (Keusetu), Program berkaitan Pengabdian Masyarakat dan Mental Spiritual (Abdimas Mensprit) termasuk Program berkaitan Kehumasan, Informatika dan Keprotokolan (Huminpro). Bahwa program demikian ditindaklanjuti secara lebih operasional melalui sejumlah program turunan dengan indikator pencapaian program sebagai instrumen evaluasi kebijakan yang seksama telah ditentukan sebelumnya. Menimbang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur telah mempunyai program yang variatif, maka secara teoritis akan menghadirkan tingkat probabilitas yang lebih terbuka untuk memenuhi

kebutuhan perkembangan pemuda yang berbeda satu sama lain seperti kebutuhan peningkatan kompetensi, kreativitas, karakter, kepercayaan diri, koneksi, kepedulian dan kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Sekalipun demikian, tidak terdapat perubahan yang teridentifikasi pada kurun waktu empat tahun terakhir, karena berbagai program dari Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur telah melembaga secara institusional.

Keberadaan Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna serta Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur, secara institusional telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dengan kecenderungan signifikan untuk terus melembaga secara gradual yang pada taraf signifikansi tertentu akan berbanding terbalik dengan dinamika perkembangan zaman, karena telah sempurna terinternalisasi pada konstituen tertentu dengan arah konfigurasi yang kompleks. Bahwa jalur kelaziman tersebut dalam konteks analisis kebijakan publik dapat melahirkan probabilitas daya resistensi terhadap perubahan kebijakan, justru tidak dapat teridentifikasi melalui pengukuran sejumlah indikator yang ditentukan. Sekalipun setiap implementor kebijakan memiliki kecenderungan signifikan untuk mempertahankan skema implementasi sebagai kebijakan distingtif selama empat tahun terakhir, namun tidak secara korelatif akan menunjukkan tingkat resistensi terhadap perubahan skema implementasi yang lebih kontekstual terutama pada era disrupsi, yang secara faktual lumrah ditemukan pada jalur kelaziman. Hal tersebut justru lebih berkorelasi dengan situasi arena tindakan seluruh implementor kebijakan yang tidak memuat kerangka koalisi advokasi sebagai representasi prima preferensi kelompok kepentingan terkait dengan kebutuhan perkembangan pemuda baik dalam subsistem kebijakan dari internal setiap implementor maupun subsistem kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, keberadaan sebuah institusi memiliki tendensi signifikan untuk mempertahankan konstruksi kebijakan yang melembaga dari lama (Sorensen, 2014) sebagai cerminan ide dominan.

Tujuan kerangka kebijakan kepemudaan nasional misalnya UU Kepemudaan, UU Ormas, UU Gerakan Pramuka, UU Desa, Permensos No. 25 Tahun 2019, PP. No. 41 Tahun 2011, PP No. 60 Tahun 2013, Perpres No. 66 Tahun 2017 dan Perda Cianjur No. 5 Tahun 2019 untuk menempatkan pemuda sebagai atraktor utama dari perubahan dalam masyarakat melalui posisi krusial sebagai kekuatan dari moralitas, kontrol realitas sosial bahkan agen perubahan, masih merupakan fiksi etis kebijakan yang belum tercapai. Proposisi tersebut dikonfirmasi dengan publikasi IPPi Tahun 2019 bahwa pencapaian IPP Kabupaten Cianjur pada interval pengukuran Provinsi Jawa Barat masih termasuk kualifikasi paling rendah dalam seluruh indikator baik partisipasi serta kepemimpinan, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan maupun gender serta diskriminasi, yang diperburuk dengan realitas pencapaian IPP

Provinsi Jawa Barat sendiri berada pada posisi juru kunci dalam skala pengukuran nasional. Oleh karena itu, bahwa pembangunan pemuda merupakan terminologi yang masih memperlihatkan masalah ketidaksetaraan sebagai cerminan ketidakadilan struktural (Hakim, Darmawan dan Anggraeni, 2022) sebagai cakramanggungan yang secara langsung melibatkan kalangan pemuda. Terlebih lagi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur hanya -0,78%, yang berdampak secara langsung terhadap lajur peningkatan jumlah pengangguran sebesar 11,05% dan penduduk miskin mencapai 10,36%. Bahwa faktualitas terkait pencapaian IPP Kabupaten Cianjur yang masih rendah dapat dikonstruksikan secara lebih seksama sebagai akumulasi bukti empirik yang menjadi tumpuan mekanisme perubahan kebijakan kepemudaan.

Terkecuali Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur, pelayanan kepemudaan justru diselenggarakan dengan skema implementasi yang kurang variatif serta implikasi kebijakan yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, sehingga masih menjadi arah implementasi kebijakan yang bermasalah dalam penyelidikan behaviorisme. Secara prosedural, skema implementasi belum memiliki kohesivitas terkait ruang lingkup, program area, penerapan dan intervensi penerapan pembangunan kalangan pemuda baik pada kerangka kebijakan kepemudaan nasional maupun pembangunan pemuda dalam praktikal global. Terlebih lagi, keberadaan motivasi, identitas sosial kultural, keadilan secara prosedural dan kepercayaan sebagai stimulus pengkondisian tingkat keterlibatan pada pelayanan kepemudaan, yang berimplikasi terhadap responsivitas natural seperti reduksi prasangka implisit, distorsi interaksi, distorsi gender bahkan psikologi destruktif kerjasama tidak dapat diidentifikasi dalam skema implementasi pada kurun waktu empat tahun terakhir. Dengan kualitas skema implementasi yang tidak secara ketat memuat asas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan baik kewirausahaan, kepeloporan maupun kepemimpinan tersebut, menjadi cukup sukar untuk mereduksi berbagai potensi masalah kepemudaan pada era disrupsi. Dengan demikian, skema implementasi yang tidak ketat menunjukkan ekuivalensi perlakuan antara konstruksi pelayanan dan tujuan kebijakan sebagai linieritas logika kebijakan merupakan cerminan kebuntuan kebijakan, yang memenuhi kualifikasi mekanisme perubahan kebijakan kepemudaan.

Ketika skema implementasi dari kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur masih bermasalah dalam berbagai konteks, maka pembangunan kepemudaan dalam praktik global telah direalisasikan dengan berbasis penguatan modal sosial sebagai konstruksi utama kebijakan. Di Amerika Serikat misalnya terdapat Organisasi 4-H sebagai organisasi yang bertujuan meningkatkan seluruh potensi

kalangan pemuda, sekaligus memajukan bidang pengembangan pemuda dengan program areal terdiri dari *Healthy Living, Science, Technology, Engineering and Math (STEM)* termasuk *Civic Engagement* yang menjadi basis penelitian perkembangan pemuda di seluruh dunia. Selain itu, terdapat juga program pasca sekolah seperti *summer learning* dari *National Summer Learning Association (NSLA)* dengan program areal terdiri dari *Professional Summer Learning Communities, Summer Policy Internship Program, Summer Innovation Fellowship* bahkan *Community Visioning for Summer Learning* yang dipilih sesuai dengan kebutuhan perkembangan dengan mentor dari kalangan profesional. Dalam pembangunan pemuda pada praktik global, terdapat juga bentuk program seperti komunitas yang sehat, mobilisasi orang dewasa dan kewirausahaan sosial-politik. Bahwa pendekatan pembangunan pemuda dalam praktik global yang demikian dapat menjadi paradigma baru untuk diadopsi sebagai kebijakan di masa mendatang, sehingga dapat dipergunakan sebagai guncangan eksternal yang bahkan mendasari mekanisme perubahan kebijakan yang mengalami kebuntuan.

Dalam analisis kebijakan publik, ketika mekanisme dari perubahan kebijakan seperti akumulasi bukti empirik, kebuntuan kebijakan bahkan guncangan eksternal telah memenuhi kualifikasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan pada waktu yang bersamaan terdapat faktualitas seluruh implementor mempunyai keterbatasan sumber daya, maka *conjunctures* sebagai hubungan interaksi implementor sebagai implikasi perubahan lingkungan strategis bahkan sukar dihindarkan. Dalam analisis jaringan kebijakan kepemudaan Kabupaten Cianjur, keberadaan dari *conjunctures* tersebut tidak dapat konkret ditemukan dalam trajektori waktu empat tahun terakhir. Berbagai klaster implementor kebijakan yang hanya terbatas pada pemerintah dan organisasi kepemudaan, secara faktual tidak memberikan bentuk perhatian spesifik terhadap mekanisme perubahan kebijakan (Hakim, 2022) yang bersumber dari arah perubahan koalisi (Brady, 1988), perubahan situasi sosial ekonomi (Eisner, 1993), perubahan opini dan implikasi dari pengambilan keputusan (Muller, 1995), bahkan dapat mempengaruhi kerangka koalisi advokasi pada subsistem kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1999). Tidak terdapat relasi interaksi antara setiap implementor kebijakan baik dengan kelompok sasaran, masyarakat umum maupun implementor lain untuk membangun agenda bersama dalam rangka meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian, *conjunctures* tidak mungkin dapat diproyeksikan signifikansinya bukan karena institusi mempunyai tingkat resistensi, melainkan juga ditentukan kualitas transaksi rasionalitas secara institusional.

Bahwa implementor kebijakan terkait telah mempunyai informasi dasar yang berkaitan dengan

sejumlah komponen dari ACF seperti berbagai pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan, kebutuhan perkembangan kalangan pemuda pada era disrupsi, parameter relatif stabil, kejadian eksternal berbasis bukti empirik, sumber daya serta perantara kebijakan (Hakim, 2022). Penguasaan informasi dasar demikian tidak cukup ketat mendorong setiap implementor kebijakan kepemudaan secara institusional untuk membangun program bersama ataupun kerangka koalisi advokasi dalam subsistem internal implementor. Dalam PNA terdapat konsentrasi spesifik terhadap perangkat kebijakan dan informasi dasar (Howlet dan Mukherjee, 2018), sementara program bersama dan agenda koalisi advokasi dapat menjadi arah langkah cermat dalam mengupayakan kohesivitas pelayanan kepemudaan terhadap prosedur kebijakan. Faktualitas tidak terdapatnya langkah strategis demikian secara akurat mencerminkan tidak terdapat upaya pelembagaan akselerasi untuk perbaikan konteks implementasi sebagai pemilihan tindakan pada arena tindakan berbasis kolektivitas. Secara terbatas, terdapat penyelidikan terkait konfigurasi aktor sebagai klaster jaringan baik sektor privat maupun sektor internal pemerintah sendiri secara internal (Mikkelsen, 2006) dari setiap implementor kebijakan, namun tidak terdapat manajemen proses yang melahirkan restriksi (De Bruijn dan Heuvelhof, 2002) kuat tentang pemilihan tindakan.

Setiap implementor kebijakan akan memiliki preferensi tersendiri yang secara konsisten terus diperjuangkan dalam jaringan kebijakan, yang dalam studi Berman (1998) merupakan keyakinan terprogram. Melalui pemetaan PNA bahwa berbagai implementor terkait berdasarkan kerangka kebijakan kepemudaan akan mempunyai preferensi yang berorientasikan terhadap upaya menunjang perkembangan pemuda, sehingga setiap implementor bukan perangkat retorik (March dan Smith, 2000) dan direstriksi perbedaan paradigma (Hay, 2004). Preferensi setiap implementor bahkan belum merepresentasikan ide aktor dalam jaringan kebijakan sebagai variabel bebas (Kisby, 2007) yang bertumpu pada keberadaan agensi dan pilihan rasionalitas dari Dowding (2001), sehingga tidak mengherankan ketika tidak terdapat proses cermat tentang interorganisasi, interdependensi kekuasaan bahkan analisis jaringan sebagai pemerintahan (Rhodes, 2006) yang melewati intermediasi kepentingan (Marsh dan Rhodes, 1992). Jaringan kebijakan kepemudaan yang tidak menunjukkan pertukaran sumber daya dan keyakinan, dialogis dengan kelompok sasaran bahkan penerapan strategi tunggal merupakan informasi prima dalam menjelaskan mengapa kalangan pemuda tidak pernah terlibat dalam pelayanan dan mempunyai aksesibilitas terbatas dalam jaringan kebijakan kepemudaan (Hakim, 2022).

Bila diferensiasi preferensi implementor kebijakan menjadi ruang alasan tidak terdapat agenda

bersama, maka seharusnya kerangka kerja koalisi advokasi sebagai model lain berbasis behaviorisme (Gil-Garcia dkk., 2017) dapat menjadi alternatif untuk melaksanakan pemecahan masalah dengan kompleksitas tinggi (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993; 1999; 1983). Rekonsiliasi pertentangan (Hoppe dan Peterse, 1993) yang dalam analisis kebijakan publik secara ilmiah telah merepresentasikan signifikansi lumayan krusial (John, 2003; Schlager, 1995; Schlager dan Blomquist, 1996) seperti dalam bidang kebijakan berkaitan energi dan lingkungan (Weible dan Sabatier, 2010) justru tidak ditemukan dalam jaringan kebijakan kepemudaan. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat diferensiasi terbuka antara preferensi dari setiap implementor kebijakan yang menuntun kerangka koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan. Dalam subsistem kebijakan pemerintah ataupun Disparpora Kabupaten Cianjur tidak terdapat proyeksi terukur terkait komponen yang relatif stabil, sistem keyakinan, koalisi advokasi kelompok kepentingan bahkan mekanisme perubahan kebijakan (Hakim, 2022) berbasis akumulasi bukti ilmiah, kebuntuan kebijakan dan kejadian eksternalitas (Sabatier dan Pelkey, 1990; Sabatier, Hunter dan McLughlin, 1987) sebagai mekanisme perubahan kebijakan kepemudaan.

Keberadaan *conjunctures* melalui representasi agenda bersama dan kerangka koalisi advokasi baik dalam subsistem kebijakan internal maupun dalam subsistem kebijakan pemerintah yang tidak dapat ditemukan dalam analisis jaringan kebijakan kepemudaan, secara konkret menunjukkan tidak terdapat hubungan antara peristiwa yang memenuhi kualifikasi sebagai mekanisme perubahan kebijakan dengan situasi pemilihan tindakan sekalipun tidak dibuktikan melalui statistik inferensial ataupun analisis kovarians. Dalam perspektif institusionalisme historis, bentuk hubungan kausalitas antara mekanisme perubahan kebijakan dengan pemilihan tindakan pada arena berbasis kolektivitas tidak perlu dilakukan melalui korelasi dua variabel yang berbeda, melainkan melakukan penyelidikan sebagai *process-tracing* terhadap latar belakang mekanisme perubahan yang secara normatif dapat menjadi anteseden dari relasi interaksional di antara implementor kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, *conjunctures* dilahirkan sebagai fenomena sosial-politik dengan samaran kontinum determinisme statistik, karena *conjunctures* sendiri merupakan bentuk probabilitas relatif dari mekanisme perubahan kebijakan. Ketika keberadaan *conjunctures* telah dinyatakan dasar behavioral yang dapat membangun probabilitas perubahan, maka pendekatan institusionalisme historis akan memberikan perhitungan lebih akurat terkait pemilihan tindakan implementor yang akan menunjukkan *self-reinforcing* dan *positive feedback* secara komprehensif.

Bahwa *temporal scope* atau lintasan waktu yang dipergunakan sebagai kunci kredibilitas analisis

pada penelitian ini memiliki interval empat tahun dimulai tahun 2018 sampai tahun 2021. Penentuan lintasan waktu yang terbatas pada kurun empat tahun tersebut, karena mempertimbangkan studi dokumentasi terkait implementasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur dari berbagai implementor kebijakan hanya dapat dieksplorasi secara historikal sampai tahun 2018. Dalam lintasan waktu empat tahun, terdapat peristiwa kritis berupa perubahan terkait lingkungan strategis sebagai implikasi langsung dari Pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 terjun bebas mencapai -0,78%, yang langsung berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah pengangguran sebesar 11,05% dan penduduk miskin mencapai 10,36% (BPS Kabupaten Cianjur, 2020). Terlebih lagi, pencapaian IPPI tahun 2020 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 terdahulu memang mengalami penurunan mencapai 1,67 poin, yang dikarenakan keterbatasan lapangan dan kesempatan kerja (Kemenko PMK, 2022) pada masa Pandemi Covid-19. Peristiwa kritis tersebut akan menempatkan pelayanan kepemudaan yang sedari lama diselenggarakan menjadi tidak cukup kontekstual dan relevan dengan kondisi kalangan pemuda, sehingga setiap implementor kebijakan akan dihadapkan dengan probabilitas perubahan kebijakan secara fundamen.

Bahwa pelayanan kepemudaan dalam program Disparpora Kabupaten Cianjur untuk tahun 2019 tidak lain adalah Pelatihan Kewirausahaan, yang memang setelah terjadi peristiwa kritis tahun 2020 dahulu mengalami perubahan menjadi Pelatihan Kepemimpinan untuk tahun 2020 dan 2021. Pelayanan kepemudaan sebagai cermin kebijakan distingtif Disparpora secara faktual mengalami perubahan besar, namun tidak mempunyai hubungan korelasi dengan peristiwa kritis yang telah berlangsung dalam lintasan waktu tersebut. Ketika implementor kebijakan kepemudaan memang kuat dihadapkan dengan realitas perbandingan terbalik antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan termasuk faktualitas krusial penurunan IPPI tahun 2020 karena aksesibilitas terbatas terhadap kesempatan kerja, maka pemilihan pelayanan kepemudaan sebagai konteks implementasi berdasarkan kalkulasi pengaturan kelembagaan serta lingkungan biofisik adalah Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan. Sebagai responsivitas dari peristiwa kritis, bahwa konteks krusial Kepeloporan dan Kewirausahaan sebagai pemilihan tindakan paling rasional ditindaklanjuti dengan budidaya Cabai di Kecamatan Takokak, yang secara normatif tidak mungkin dapat dikualifikasikan sebagai Program Ketahanan Pangan sesuai klaim DPD KNPI Kabupaten Cianjur karena tidak memenuhi subsistem dari taraf penyerapan pangan (*Food and Agriculture Organization*, 2019; 2020; *United Nations Development Programme*, 2019; Alkire dan Jahan,

2018), akses terhadap pangan (*Food and Agriculture Organization*, 2017) serta ketersediaan pangan (Beghin, Meade dan Rosen, 2017).

Sementara program Karang Taruna Kabupaten Cianjur, secara konsisten dan terukur mengupayakan pelebagaan Karang Taruna Desa dalam konteks kasuistis model percontohan, tentu alokasi sumber daya finansial yang diperoleh dari sumber mandiri secara faktual cukup memadai. Sekalipun demikian, upaya Karang Taruna Kabupaten Cianjur untuk melebarkan eksistensi Karang Taruna Desa yang akan menjadi bagian dari sistem kehidupan masyarakat Cianjur tentu akan membutuhkan alokasi dan distribusi sumber daya pendanaan yang lumayan besar, sehingga untuk sementara hanya bersifat pendekatan kasuistis. Berbeda dengan implementor yang lain, sekalipun terdapat peristiwa kritis yang menuntut terdapat pelayanan berbasis pengembangan kewirausahaan, Gerakan Pramuka Kwarda Cianjur memilih untuk terkonsentrasi pada pengembangan kepeloporan melalui Standarisasi Kemampuan Anggota SRU 0903, Penataan Satuan Tugas Pramuka Peduli, Gladi Satya Dharma ke-18, Penanggulangan Bencana dan arah *Vertical Rescue*, Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Sosialisasi Gugus Depan Lingkungan, Pendidikan dan Latihan Kader Pramuka Peduli tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Pelelah Kitri, Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Pelaksanaan Hari Besar Islam, Penyusunan dan Penerbitan Buku Pedoman Kepramukaan dalam Keagamaan Islam, Pelaksanaan Tiga Pilar Budaya dan Kegiatan Pramuka Peduli.

Kecenderungan signifikan dari berbagai implementor untuk mempertahankan kebijakan dalam trajektori waktu empat tahun terakhir, secara substantif berkenaan dengan tingkat ruang persebaran ide dalam jaringan kebijakan kepemudaan. Bahwa ide sebagai manifestasi dari sistem nilai dalam masyarakat dapat menjadi kekuatan institusi informal dalam memberikan *guidelines* serta *constraints* dalam pemilihan tindakan dari implementor, ternyata tidak dapat ditemukan pada trajektori transaksi preferensi terkait proses intermediasi kepentingan, interorganisasi, interdependensi kekuasaan dalam jaringan kebijakan kepemudaan. Setiap implementor tidak pernah melakukan transaksi ide perubahan melalui pertukaran informasi, sumber daya dan keyakinan baik dengan implementor yang lain, kelompok sasaran, masyarakat sipil, analis kebijakan, kalangan akademisi maupun sektor privat. Tingkat persebaran ide perubahan skema implementasi pelayanan kepemudaan secara faktual cukup prima melebarkan dalam lingkungan internal DPD KNPI serta Karang Taruna Kabupaten Cianjur, namun dimensi ideasional tersebut tidak mencapai signifikansi yang dalam perspektif Langer (1945) merupakan gagasan dengan kekuatan intelektualitas yang dapat melakukan pemecahan masalah dengan roda akselerasi menakjubkan bahkan membersihkan

masalah dari infeksi distorsi dan ketidakpastian. Bahwa keberadaan ide perubahan skema implementasi yang masih embrionik demikian, dalam konteks analisis persebaran ide dari Bleich tidak mungkin menjadi proposisi tajam terhadap ide konvensional dominan melebarkan sedari lama (Bleich, 2017).

Benoit Mandelbrot sebagai matematikawan berkebangsaan Perancis memang lebih revolusioner membawa jalur dasar penyelidikan tentang turbulensi intermiten (Mandelbrot, 1971; 1974; 1975; 1976) sebagai cermin harmoni dari dualitas realitas ketidaksinambungan *chaos* dan *order* yang memang tidak diperhatikan paradigma reduksionisme, sekalipun sedari lama telah mendominasi arah perkembangan ilmu pengetahuan. Bahwa keberadaan *chaos* dan *order* sebagai teori terkait determinisme mempunyai tingkat sensitivitas terbuka terhadap stimulus inisial, sehingga menjadi sukar melaksanakan proyeksi secara akurat terhadap realitas dalam jangka panjang. Dalam konteks analisis kebijakan publik, keberadaan konsepsi *chaos* dan *order* dari kebijakan direpresentasikan melalui turbulensi intermiten sebagai domain kuantum transenden, dimana potensi dan probabilitas perubahan ataupun keberlanjutan suatu kebijakan mencapai taraf signifikansi relatif. Dengan demikian, transformasi terkait kebijakan kepemudaan hanya akan dimungkinkan oleh keberadaan atraktor sebagai region magnetik perubahan misalnya akumulasi bukti ilmiah, kebuntuan kebijakan bahkan guncangan eksternal, yang secara konsisten memberikan *positive feedback* terhadap seluruh implementor kebijakan dalam rangka melahirkan *self-reinforcing* untuk menjadi institusi mapan. Proses *feedback* implementasi kebijakan yang tidak menghasilkan *self-reinforcing* dalam trajektori *increasing returns* kebijakan, dapat menyebabkan sistem kebijakan kepemudaan teramplifikasi, sehingga pada tahapan kulminasinya dapat mengalami fluks sebagai realitas pilihan melakukan perubahan mendasar dengan proyeksi titik bifurkasi.

Bahwa titik bifurkasi merupakan konsep paling fundamen terkait karakteristik keberadaan *chaos* dan *order* pada sistem (Prigogine dan Nicolis, 1985; Nicolis dan Prigogine, 1981; Prigogine, 1987; 2000), yang secara etimologi menjadi titik sentral percabangan. Dalam titik bifurkasi tersebut, kebijakan kepemudaan akan memiliki probabilitas untuk mengarah pada perubahan ataupun keberlanjutan kebijakan yang ketika telah mencapai stabilitas sistem kebijakan akan menunjukkan daya resistensi yang umum ditemukan dalam jalur kelaziman dalam jangka panjang. Karena dalam lingkungan internal implementor bersangkutan tidak terdapat *self-reinforcing* serta *positive feedback* dari berbagai dinamika kelembagaan yang terjadi dalam lintasan empat tahun terakhir, maka titik ruang bifurkasi tersebut tidak akan mengarah pada konsep Streek dan Thelen (2005) terkait perubahan kebijakan

seperti *displacement*, *layering*, *drift* bahkan *conversion*. Sedari tahun 2018, skema implementasi sebagai kebijakan dari implementor bersangkutan tidak mencerminkan situasi *displacement* dengan terdapat perubahan regulasi secara mendasar (Mahoney dan Thelen, 2012) baik melalui perubahan secara radikal dalam konteks waktu cepat maupun melalui proses bertahap secara simultan. *Layering* yang mencerminkan sintesis aturan baru dalam konstruksi aturan lama (Schickler, 2001; Thelen, 2003) sebagai amandemen, revisi termasuk berbagai penambahan tentang poin tertentu (Mahoney dan Thelen, 2012) yang dalam konteks penelitian ini juga tidak dapat diidentifikasi.

Dalam analisis kebijakan publik, bahwa *Drift* terjadi ketika pengaturan terus mengalami perubahan, karena terdapat perubahan kondisi eksternal (Hacker, 2005) yang menuntut transformasi kebijakan. Dengan mempertimbangkan akumulasi dari bukti empirik, kebuntuan kebijakan bahkan guncangan eksternal, maka perubahan kebijakan kepemudaan dalam konteks *Drift* yang paling relevan. Hanya saja, setiap implementor kebijakan memilih untuk tidak memberikan respons apapun terhadap mekanisme perubahan kebijakan, karena tekanan dari kelompok *status quo* sebagai representasi ide dominan telah melembaga, sekalipun ruang diskresi dan perubahan terbuka. Adapun *Conversion* sebagai gaya interpretasi moderat terhadap pengaturan kelembagaan (Thelen, 2003) yang menghasilkan berbagai perubahan lebih realistis dalam masyarakat, juga bukan arah perubahan sistem kebijakan kepemudaan. Titik bifurkasi dari sistem kebijakan kepemudaan yang teramplifikasi, justru mempunyai orientasi terhadap ruang repetisi sebagai cermin keberlanjutan kebijakan yang telah hadir sedari lama. Tanpa keberadaan *self-reinforcing* dan *positive feedback* dalam lingkungan internal institusi, maka menjalankan perubahan secara holistik terhadap skema implementasi sebagai kebijakan distingtif implementor menjadi situasi sulit, sekalipun direalisasikan melalui prosedur legal sebagai pilihan rasional dalam arena tindakan berbasis kolektivitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil temuan dan pembahasan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa skema implementasi pelayanan kepemudaan sebagai kebijakan distingtif dari Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna termasuk Gerakan Pramuka Kwarda Cianjur merupakan pengulangan kebijakan secara holistik, sehingga tidak terdapat indikator yang mencerminkan perkembangan kelembagaan dalam rentang empat tahun terakhir. Secara lebih spesifik, setiap implementor tidak memiliki daya resistensi terhadap perubahan yang pada umumnya bahkan mudah ditemukan pada jalur kelaziman, namun dibutuhkan kerangka koalisi advokasi dengan sumber daya dan preferensi mapan untuk menunjang transformasi

pelayanan kepemudaan secara lebih kontekstual terhadap kebutuhan perkembangan pemuda. Sekalipun perubahan lingkungan strategis telah diidentifikasi keberadaannya melalui akumulasi bukti empirik, kebuntuan kebijakan kepemudaan dan guncangan eksternal, ternyata tidak dipergunakan sebagai mekanisme berkaitan perubahan kebijakan yang melahirkan *conjuncture* sebagai hubungan interaksi yang menjadi konteks kausalitas perubahan lingkungan strategis tersebut. Dengan demikian, keputusan dari setiap implementor untuk mempertahankan kebijakan yang ada untuk periode selanjutnya menunjukkan secara kurat tidak terdapat inisiasi dan reproduksi pelayanan kepemudaan yang jauh lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan pemuda pada era disrupsi, sehingga seluruh implementor tidak mengalami *self-reinforcing* dan *positive feedback* yang konkret dari dinamika kelembagaan internal selama beberapa tahun terakhir.

5. REFERENSI

- Alkire, S. & Jahan, S. (2018). *The New Global MPI 2018: Aligning with the Sustainable Development Goals*. New York: HDRO Occasional Paper. Diakses dari <https://hdr.undp.org/content/new-global-mpi-2018-aligning-sustainable-development-goals>.
- Andersen, D. J., Redlawsk, D. P., & Lau, R. R. (2019). The Dynamic Process Tracing Environment (DPTE) as a Tool for Studying Political Communication. *Political Communication*, 36(2), 303-314. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1579771>.
- Arnot, M. & Swartz, S. (2012). Youth Citizenship and the Politics of Belonging: Introducing Contexts, Voices, Imaginaries. *Comparative Education*, 48(1), 1-10. <https://doi.org/10.1080/03050068.2011.637759>.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2019). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Bappenas.
- Beach, D. & Pedersen, R.B. (2011). "What is Process-Tracing Actually Tracing? The Three Variants of Process Tracing Methods and Their Uses and Limitations". Dalam APSA 2011 Annual Meeting Paper. Diakses dari <https://ssrn.com/abstract=1902082>.
- Beach, D. & Pedersen, R.B. (2013). *Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines*. Michigan: University of Michigan Press.
- Beach, D. (2016). It's All About Mechanisms—What Process-Tracing Case Studies Should Be Tracing. *New Political Economy*, 21(5), 463-472. <https://doi.org/10.1080/13563467.2015.1134466>.

- Beghin, J., Meade, B., & Rosen, S. (2017). A food Demand Framework for International Food Security Assessment. *Journal of Policy Modeling*, 39(5), 827–842. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2017.06.001>.
- Bell, D. (1973). *The Coming of Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.
- Bennett, A. (2009). Process Tracing: A Bayesian Perspective. Dalam J.M. Box-Steffensmeier, H.E. Brady dan D. Collier (Penyunting), *The Oxford Handbook of Political Methodology* (hlm. 702-721). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286546.003.0030>.
- Berman, S. (1998) *The Social Democratic Moment: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bleich, E. (2017). Historical Institutionalism and Judicial Decision-Making. *World Politics*, 70(01), 53–85. <https://doi.org/10.1017/S0043887117000272>.
- Bloom, D., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The Demographic Dividend: A New Perspective On The Economic Consequences Of Population Change*. Rand Corporation.
- Blyth, M., Helgadottir, O., & Kring, W. (2016). Ideas and Historical Institutionalism. Dalam O. Fioretos, T.G. Falleti dan A. Sheingate (Penyunting), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism* (hlm. 142-162). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.8>.
- Boychuk, G. (2017). “Studying Public Policy”: Historical Institutionalism and the Comparative Method. *Canadian Journal of Political Science*, 49(4), 743-761. <https://doi.org/10.1017/S0008423916001220>.
- Brady, D. (1988). *Critical Elections and Congressional Policy Making*. Stanford: Stanford University Press.
- Capocchia, G. (2016). Critical Junctures. Dalam O. Fioretos, T.G. Falleti dan A. Sheingate (Penyunting), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism* (hlm. 89-106). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.5>.
- Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. *Political Science & Politics*, 44(4), 823-830. <https://doi.org/10.1017/S1049096511001429>.
- Çondur, F. & Şimşir, N.C. (2017). An Analysis of the Relationship Between Educational Expenditures, Economic Growth and Youth Unemployment in Turkey. *The Journal of International Scientific Researches*, 2(6), 44-59. <https://doi.org/10.23834/isrjournal.306855>.
- Crasnow, S. (2017). Process Tracing in Political Science: What's The Story?. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 62, 6-13. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2017.03.002>.
- Cuervo, H. & Miranda, A. (2019). Youth in the Global South: An Introduction. Dalam H. Cuervo & A. Miranda (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South* (hlm. 1-13). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_1.
- De Bruijn, H. & Heuvelhof, E. (2002). Policy Analysis and Decision Making in a Network: How to Improve the Quality of Analysis and the Impact on Decision Making. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 20(4), 232–242. <https://doi.org/10.3152/147154602781766627>.
- Devadoss, A.V. & Anand, M.C.J. (2013). Impact of Social Media on Youth Activism and Nation Building in Pervasive Social Computing using Neutrosophic Cognitive Maps (NCMs). *International Journal of Computing Algorithm*, 2, 257-262.
- Disparpora Kabupaten Cianjur. (2018). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Cianjur: Disparpora Cianjur.
- Disparpora Kabupaten Cianjur. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Cianjur: Disparpora Cianjur.
- Disparpora Kabupaten Cianjur. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Cianjur: Disparpora Cianjur.
- Disparpora Kabupaten Cianjur. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Cianjur: Disparpora Cianjur.
- Dowding, K. (2001). There Must Be End to Confusion: Policy Networks, Intellectual Fatigue, and the Need for Political Science Methods Courses in British Universities. *Political Studies*, 49(1), 89–105. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00304>.
- Eisner, M.A. (1993). *Regulatory Politics in Transition*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Fairfield, T., & Charman, A. (2017). Explicit Bayesian Analysis for Process Tracing: Guidelines, Opportunities, and Caveats. *Political Analysis*, 25(3), 363-380. <https://doi.org/10.1017/pan.2017.14>.
- Falleti, T. G. (2016). Process Tracing of Extensive and Intensive Processes. *New political economy*, 21(5), 455-462. <https://doi.org/10.1080/13563467.2015.1135550>.
- Food and Agriculture Organization. (2017). *Methods for Estimating Comparable Prevalence Rates of Food Insecurity Experienced by Adults throughout the World*. Roma: Food and Agriculture Organization. Diakses dari

- <https://www.fao.org/publications/card/en/c/2c22259f-ad59-4399-b740-b967744bb98d>.
- Food and Agriculture Organization. (2019). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2019: Safeguarding Against Economic Slowdowns and Downturns*. Roma: Food and Agriculture Organization. <https://doi.org/10.4060/CA5162EN>.
- Food and Agriculture Organization. (2020). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020: Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets*. Roma: Food and Agriculture Organization. <https://doi.org/10.4060/ca9692en>.
- Fioretos, Dkk. (2016). Historical Institutionalism in Political Science. Dalam O. Fioretos, T.G. Falleti dan A. Sheingate (Penyunting), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism* (hlm. 3-28). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.1>.
- Flanagan, C.A. & Christens, B.D. (2011). Youth Civic Development: Historical Context and Emerging Issues. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 2011(134), 1–9. <https://doi.org/10.1002/cd.307>.
- Fukuyama, F. (2004). *The End of History and the Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Terj. M. H. Amrullah. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Fukuyama, F. (2010). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terj. Ruslani. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Fukuyama, F. (2016). *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*. Terj. Ruslani. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Gambetta, D. & Sugden, R. (1995). The Sicilian mafia: The Business of Private Protection. *Journal of Economic Literature*, 33(2), 863–864. <https://www.jstor.org/stable/2729062>.
- Gil-Garcia, J.R., Pardo, T.A., & Luna-Reyes, L.F. (2017). Policy Analytics: Definitions, Components, Methods, and Illustrative Examples. *Policy Analytics, Modelling, and Informatics*, 1–16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61762-6_1.
- Göçer, I. & Erdal, L. (2015). The Relationship between Youth Unemployment and Economic Growth in Central and Eastern European Countries. *Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences* 5(1), 174.
- Hacker, J.S. (2005). Policy Drift: The Hidden Politics of US Welfare State Retrenchment. Dalam S. Wolfgang & K. Thelen (Penyunting), *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Hakim, M.A.L. (2022). Transformasi Kebijakan Kepemudaan dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Antara Prosedur, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur) (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari <http://repository.upi.edu/id/eprint/81183>.
- Hakim, M.A.L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2022). Diskursus Kebijakan Kepemudaan dalam Perspektif Behavioralisme dan Neo-Institusionalisme (Pendahuluan Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur). *Jurnal Education and Development*, 10(3), 684–693. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3733>.
- Hall, P.A. (2016). Politics as a Process Structured in Space and Time. Dalam O. Fioretos, T.G. Falleti dan A. Sheingate (Penyunting), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism* (hlm. 31-50). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.2>.
- Hay, C. (2004). Taking Ideas Seriously in Explanatory Political Analysis. *British Journal of Politics and International Relations*, 6(2), 142–148.
- Hay, C. (2016). Process Tracing: A Laudable Aim or A High-Tariff Methodology?. *New political economy*, 21(5), 500–504. <https://doi.org/10.1080/13563467.2016.1201806>.
- Hoppe, R. & Peterse, A. (1993). *Handling Frozen Fire*. Boulder, CO: Westview Press.
- Howlett, M. & Mukherjee, I. (2018). The Contribution of Comparative Policy Analysis to Policy Design: Articulating Principles of Effectiveness and Clarifying Design Spaces. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(1), 72–87. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1418223>.
- Huntington, S.P. (2012). *Benturan Antar Perdaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Terj. Ruslani. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Jeffrey, C. & Mcdowell, L. (2004). Youth in a Comparative Perspective. *Youth & Society*, 36(2), 131–142. <https://doi.org/10.1177/0044118x04268375>.
- John, P. (2003). Is There Life After Policy Streams, Advocacy Coalitions, and Punctuations: Using Evolutionary Theory to Explain Policy Change?. *Policy Studies Journal*, 31(4), 481–498. <https://doi.org/10.1111/1541-0072.00039>.
- Kay, A., & Baker, P. (2015). What Can Causal Process Tracing Offer to Policy Studies? A Review of the Literature. *Policy Studies*

- Journal*, 43(1), 1-21.
<https://doi.org/10.1111/psj.12092>.
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Perlu Kerja Keras Bersama Untuk Tingkatkan Indeks Pembangunan Pemuda*. Diakses dari <https://www.kemendikpmk.go.id/perlu-kerja-keras-bersama-untuk-tingkatkan-indeks-pembangunan-pemuda>.
- Kisby, B. (2007). Analysing Policy Networks. *Policy Studies*, 28(1), 71–90.
<https://doi.org/10.1080/01442870601121502>.
- Kittel, B., & Kuehn, D. (2013). Introduction: Reassessing the Methodology of Process Tracing. *European political science*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.1057/eps.2012.4>.
- Lorentzen, P., Fravel, M. T., & Paine, J. (2017). Qualitative Investigation of Theoretical Models: The Value of Process Tracing. *Journal of Theoretical Politics*, 29(3), 467–491.
<https://doi.org/10.1177/0951629816664420>.
- Mahoney, J. & Thelen, K. (2012). A Theory of Gradual Institutional Change. Dalam J. Mahoney & K. Thelen (Penyunting), *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power* (hlm. 1-32). Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511806414.003>.
- Mahoney, J. (2010). After KKV: The New Methodology Of Qualitative Research. *World Politics*, 62(1), 120-147.
<https://doi.org/10.1017/S0043887109990220>.
- Mahoney, J. (2012). The Logic of Process Tracing Tests in the Social Sciences. *Sociological Methods & Research*, 41(4), 570-597.
<https://doi.org/10.1177/0049124112437709>.
- Mahoney, J. (2012). The Logic of Process Tracing Tests in the Social Sciences. *Sociological Methods & Research*, 41(4), 570–597.
<https://doi.org/10.1177/0049124112437709>.
- Mahoney, J. (2015). Process Tracing and Historical Explanation. *Security Studies*, 24(2), 200-218.
<https://doi.org/10.1080/09636412.2015.1036610>.
- Mahoney, J. (2017). Shift Happens: The Historical Institutionalism of Kathleen Thelen. *PS: Political Science & Politics*, 50(04), 1115–1119.
<https://doi.org/10.1017/S1049096517001494>.
- Mahoney, J., Mohamedali, K., & Nguyen, C. (2016). Dalam O. Fioretos, T.G. Falleti dan A. Sheingate (Penyunting), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism* (hlm. 71-88). Oxford: Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.4>.
- Mandelbrot, B. (1974). Intermittent Turbulence in Self-Similar Cascades: Divergence of High Moments and Dimension of the Carrier. *Journal of Fluid Mechanics*, 62(2), 331-358.
<https://doi.org/10.1017/S0022112074000711>.
- Mandelbrot, B. (1975). On The Geometry of Homogeneous Turbulence, with Stress on the Fractal Dimension of the Iso-Surfaces of Scalars. *Journal of Fluid Mechanics*, 72(3), 401-416.
<https://doi.org/10.1017/S0022112075003047>.
- Mandelbrot, B. (1976). Intermittent Turbulence and Fractal Dimension: Kurtosis and the Spectral Exponent $5/3+B$. Dalam R. Temam (Penyunting), *Turbulence and Navier Stokes Equations* (hlm. 121–145). Berlin, Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/BFb0091452>.
- Mandelbrot, B.B. (1972). Possible Refinement of the lognormal Hypothesis Concerning the Distribution of Energy Dissipation in Intermittent Turbulence. Dalam M. Rosenblatt & C. Van Atta (Penyunting), *Statistical Models and Turbulence* (hlm. 333–351). Berlin, Heidelberg: Springer.
https://doi.org/10.1007/3-540-05716-1_20.
- Mandelbrot, B.B. (1999). Intermittent Free Turbulence. Dalam B.B. Mandelbrot (Penyunting), *Multifractals and 1/f Noise* (hlm 292 – 293). New York: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4612-2150-0_13.
- March, J.G. & Smith, M. (2000). Understanding Policy Networks: Towards a Dialectical Approach. *Political Studies*, 48(1), 4–21.
<https://doi.org/10.1111/1467-9248.00247>.
- Marsh, D. & Rhodes, R.A.W. (1992) *Policy Networks in British Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Mikkelsen, M. (2006). Policy Network Analysis as a Strategic Tool for the Voluntary Sector1. *Policy Studies*, 27(1), 17–26.
<https://doi.org/10.1080/01442870500499868>.
- Muhaemin, N.M. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 201-222.
<https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.269>.
- Nicolis, G. & Prigogine, I. (1981). Symmetry Breaking and Pattern Selection in Far-From-Equilibrium Systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 78 (2) 659-663. <https://doi.org/10.1073/pnas.78.2.659>.
- Onwuka, E. dkk. (2020) Implications of Youth Unemployment and Violent Crime on the Economic Growth (A Case Study of Anambra State, Nigeria). *Australian Journal of Commerce Study*. Diakses dari <https://ssrn.com/abstract=3660350>.
- Payne, G. & Payne, J. (2004). *Key Concepts in Social Research*. London: Sage Publication.
- Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.

- American Political Science Review*, 94(02), 251–267. <https://doi.org/10.2307/2586011>.
- Pierson, P. (2016). Power in Historical Institutionalism. Dalam O. Fioretos, T.G. Falleti dan A. Sheingate (Penyunting), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism* (hlm. 124-141). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.7>.
- Prigogine, I. & Nicolis, G. (1985). Self-Organisation in Nonequilibrium Systems: Towards A Dynamics of Complexity. Dalam M. Hazewinkel, R. Jurkovich & J.H.P. Paelinck (Penyunting), *Bifurcation Analysis* (hlm. 3–12). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-6239-2_1.
- Prigogine, I. (1978). Time, Structure and Fluctuations. *Science*, 201(4358), 777-785. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.201.4358.777>.
- Prigogine, I. (2000). The Networked Society. *Journal of World-Systems Research*, 6(3), 892-898. <https://doi.org/10.5195/jwsr.2000.203>.
- Purwanto, E.A. & Sulistyastuti, D.R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, F. & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktik*. Depok: Pustaka PL3ES.
- Rhodes, R.A.W. (2006). Policy Network Analysis. Dalam R. Goodin, M. Moran & M. Rein (Penyunting), *The Oxford Handbook of Public Policy* (hlm. 425–447). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0020>.
- Ricks, J. I., & Liu, A. H. (2018). Process-Tracing Research Designs: A Practical Guide. *PS: Political Science & Politics*, 51(4), 842-846. <https://doi.org/10.1017/S1049096518000975>.
- Rohlfing, I. (2013). Varieties of Process Tracing and Ways to Answer Why-Questions. *European Political Science*, 12(1), 31-39. <https://doi.org/10.1057/eps.2012.7>.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1988). An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein. *Policy Sciences*, 21(2-3), 129–168. <https://doi.org/10.1007/BF00136406>.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P.A. & Jenkins-Smith, H. (1999). The Advocacy Coalition Framework: An assessment. Dalam P. Sabatier (Penyunting), *Theories of the Policy Process*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P.A. & Pelkey, N. (1987). Incorporating Multiple Actors and Guidance Instruments into Models of Regulatory Policymaking: An Advocacy Coalition Framework. *Administration & Society*, 19(2), 236–263. <https://doi.org/10.1177/00953997870190205>.
- Sabatier, P.A., Hunter, S., & McLaughlin, S. (1987). The Devil Shift: Perceptions and Misperceptions of Opponents. *Political Research Quarterly*, 40(3), 449–476. <https://doi.org/10.1177/106591298704000306>.
- Saldaña, J. (2009). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Schickler, E. (2001). *Disjointed Pluralism: Institutional Innovation and the Development of the U.S. Congress*. Princeton: Princeton University Press.
- Schlager, E. & Blomquist, W. (1996). A Comparison of Three Emerging Theories of the Policy Process. *Political Research Quarterly*, 49(3), 651–672. <https://doi.org/10.1177/106591299604900311>.
- Schlager, E. (1995). Policy Making and Collective Action: Defining Coalitions Within the Advocacy Coalition Framework. *Policy Sciences*, 28(3), 243–270. <https://doi.org/10.1007/BF01000289>.
- Skocpol, T. & Pierson, P. (2002). *Historical Institutionalism in Contemporary Political Science*. Dalam Katznelson I & Milner HV (Penyunting), *Political Science: State of the Discipline*. New York: W.W. Norton.
- Sorensen, A. (2014). Taking Path Dependence Seriously: An Historical Institutionalism Research Agenda in Planning History. *Planning Perspectives*, 30(1), 17–38. <https://doi.org/10.1080/02665433.2013.874299>.
- Steinmo, S. (2016). Historical Institutionalism and Experimental Methods. Dalam O. Fioretos, T.G. Falleti dan A. Sheingate (Penyunting), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism* (hlm. 107-123). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.6>.
- Streeck, W. & Thelen, K. (2005). Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies. Dalam S. Wolfgang & K. Thelen (Penyunting), *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Thelen, K. & Conran, J. (2016). Institutional Change. Dalam O. Fioretos, T.G. Falleti dan A. Sheingate (Penyunting), *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism* (hlm. 51-70). Oxford: Oxford University Press.

- <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199662814.013.3>.
- Thelen, K. (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. *Annual Review of Political Science*, 2(1), 369-404. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.369>
- Thelen, K. (2003). How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis. Dalam J. Mahoney & D. Rueschemeyer (Penyunting), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803963.007>.
- Threadgold, S. (2019). Figures of Youth: on the very Object of Youth Studies. *Journal of Youth Studies*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1636014>.
- Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. New York: William Morrow.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations Development Programme. (2019). *2019 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)*. New York: Illuminating Inequalities. Diakses dari <https://hdr.undp.org/content/2019-global-multidimensional-poverty-index-mpi>.
- Urdal, H. (2006). A Clash of Generations? Youth Bulges and Political Violence. *International Studies Quarterly*, 50(3), 607-629. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2006.00416.x>.
- Vanhala, L. (2017). Process Tracing in the Study Of Environmental Politics. *Global Environmental Politics*, 17(4), 88-105. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00434.
- Weible, C.M. & Sabatier, P.A. (2007). A Guide to the Advocacy Coalition Framework. Dalam F. Fischer, G.J. Miller & M.S. Sidney (Penyunting), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods* (hlm. 123-134). London: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Wong, W. (2013). The Search For a Model of Public Administration Reform in Hong Kong: Weberian Bureaucracy, New Public Management or Something Else?. *Public Administration and Development*, 33(4), 297-310. <https://doi.org/10.1002/pad.1653>.
- Woodman, D., Shildrick, T., & MacDonald, R. (2020). Inequality, continuity and change: Andy Furlong's legacy for youth studies. *Journal of Youth Studies*, 23(1), 1-11. <https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1704405>.
- Youniss, J. & Yates, M. (1999). Youth Service and Moral-Civic Identity: A Case for Everyday Morality. *Educational Psychology Review* (11), 361-376. <https://doi.org/10.1023/a:1022009400250>.